

KAJIAN LITERATUR PEMUTUSAN *POVERTY TRAP* MELALUI PENGUATAN UMKM DI INDONESIA

Diwayana Putri Nasution

Politeknik Aceh

E-mail: putri@politeknikaceh.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the strengthening of MSMEs through policy interventions to break the poverty trap. The poverty trap is a persistent poverty situation where poor households experience limited assets, capital, skills, technology, and market access, making it difficult to improve their welfare. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are a strategic instrument in reducing poverty. The method used is a literature review from various scientific journals and a review of literature related to this research. The results show that strengthening MSMEs through the integration of capital access, training, mentoring, digitalization, and market access can increase business capacity, productivity, and income of entrepreneurs. This increase encourages asset accumulation, investment in business and human resources, and strengthens household economic resilience. MSME strengthening policies will be effective by tailoring interventions to the level of business development. MSMEs still in survival mode require basic support in the form of financing, training, and mentoring, while MSMEs with the potential to grow require support that is more oriented towards innovation, digitalization, certification, and expanding market networks. Therefore, integrated, multi-layered, and adaptive policies are key to strengthening the role of MSMEs as instruments of inclusive and sustainable economic development in structurally reducing poverty.

Keywords: *Poverty Trap, MSMEs, Policy, Poverty.*

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, modal, dan peluang usaha. Dalam banyak kasus, rumah tangga miskin mengalami hambatan berulang untuk meningkatkan produktivitas karena kekurangan aset dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, suatu kondisi yang sering dikaitkan dengan konsep *poverty trap* (Azman et al., 2021).

Kemiskinan multidimensional mencakup deprivation pada berbagai dimensi dasar kehidupan, yaitu dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, standar hidup layak, pekerjaan dan kekayaan. Menurut Chambers (dalam Suryawati, 2005) perangkat kemiskinan (deprivation trap) yang terdiri dari lima unsur saling terkait yaitu ketidakberdayaan (*powerlessness*), kerentanan (*vulnerability*), kelemahan fisik (*physical weakness*), kemiskinan (*poverty*), dan isolasi (*isolation*). Dalam arti luas, kemiskinan merupakan konsep terintegrasi yang memiliki lima dimensi yaitu kemiskinan ekonomi, ketidakberdayaan, kerentanan menghadapi situasi darurat, ketergantungan, dan keterasingan geografis maupun sosiologis.

Jebakan kemiskinan (*poverty trap*) adalah fenomena ekonomi di mana individu, keluarga, atau komunitas mengalami kemiskinan secara berulang dan turun-temurun karena keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan peluang kerja. Konsep *poverty trap* pertama kali diperkenalkan oleh Gunnar Myrdal, ekonom asal Swedia, yang menjelaskan bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh faktor internal seperti

produktivitas rendah, tetapi juga oleh pengaruh eksternal seperti kebijakan pemerintah, kondisi pasar, dan norma sosial. World Bank menyatakan bahwa penyebab dasar kemiskinan adalah rendahnya perkembangan ekonomi dan pembentukan sumber daya manusia, budaya hidup yang tidak produktif, kebijakan pembangunan yang bias perkotaan serta sistem yang kurang inklusif (Sukardi et al., 2021).

Upaya pemutusan perangkap kemiskinan perlu diarahkan pada penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, peningkatan konektivitas wilayah untuk mengurangi isolasi geografis, pemberdayaan ekonomi berbasis syariah melalui optimalisasi zakat, wakaf produktif, dan lembaga keuangan mikro syariah (Annisa et al., 2025). Diperlukan pula pendekatan holistik yang memperhatikan dimensi kesehatan, pendidikan, standar hidup, pekerjaan, dan kekayaan (Artha, 2023). Bank Dunia melalui *Development Report on Poverty* menekankan tiga hal dalam menanggulangi kemiskinan yaitu perkembangan ekonomi yang luas serta padat karya untuk menciptakan peluang kerja, pengembangan SDM (pembelajaran, kesehatan, serta gizi), dan memastikan akses terhadap fasilitas yang ada.

Di Indonesia, UMKM menempati posisi yang strategis dalam perekonomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja, menopang kegiatan ekonomi skala lokal, dan mendorong pemerataan pendapatan. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa UMKM memiliki kontribusi nyata dalam pengentasan kemiskinan karena membuka peluang usaha bagi masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah (Rachmawati, 2020). Hasil kajian menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan melalui beberapa jalur. Pertama, UMKM menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang tidak terserap sektor formal. Kedua, UMKM menyediakan sumber pendapatan bagi rumah tangga melalui aktivitas usaha skala kecil yang relatif mudah diakses. Ketiga, UMKM memperkuat ekonomi lokal karena banyak berkembang di tingkat komunitas dan wilayah. Peran tersebut menjadi sangat penting di negara berkembang seperti Indonesia, ketika sebagian besar masyarakat masih menggantungkan nafkah pada usaha skala kecil dan kegiatan ekonomi informal. Dengan demikian, UMKM dapat berfungsi sebagai pintu masuk mobilitas ekonomi bagi rumah tangga berpendapatan rendah, terutama ketika akses terhadap pekerjaan formal terbatas (Rachmawati, 2020).

Peranan UMKM dalam pengurangan kemiskinan tidak selalu berjalan optimal. Beberapa studi menegaskan bahwa kelemahan akses pembiayaan, rendahnya kapasitas manajerial, lemahnya inovasi, dan keterbatasan pemanfaatan teknologi masih menjadi kendala utama yang membatasi kemampuan UMKM untuk berkembang secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan UMKM saja belum cukup, melainkan yang dibutuhkan adalah penguatan UMKM secara sistematis agar sektor ini mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi kemiskinan (Aulia et al., 2024). UMKM di Indonesia sendiri masih menghadapi beragam kendala yang menghambat kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan. Kendala yang paling sering disebut dalam literatur adalah keterbatasan modal, rendahnya kemampuan manajerial, minimnya inovasi, lemahnya akses pemasaran, dan rendahnya pemanfaatan teknologi digital (Azman et al., 2021). Kendala-kendala tersebut menyebabkan banyak UMKM bertahan pada level subsisten dan sulit berkembang menjadi usaha yang produktif dan berkelanjutan. Dalam kondisi seperti ini, UMKM memang dapat membantu rumah tangga bertahan hidup, tetapi belum tentu cukup kuat untuk mendorong mereka keluar dari kemiskinan secara permanen (Lubis et al., 2024).

Diperlukan kajian mengenai peranan penguatan UMKM dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui telaah literatur yang bersifat kualitatif dan eksploratif (Lubis et al., 2024). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran penguatan UMKM dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini melihat sejauh mana penguatan UMKM dapat

berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia, dan seberapa besar strategi tersebut memutuskan *poverty trap* yang ada di Indonesia.

2. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana integrasi penguatan UMKM melalui akses modal, pelatihan, pendampingan, digitalisasi, dan akses pasar berperan dalam meningkatkan kapasitas usaha serta memutus lingkaran kemiskinan (*poverty trap*) ?
2. Bagaimana intervensi kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik UMKM agar dapat meningkatkan efektivitas penguatan UMKM dalam mengurangi kemiskinan?

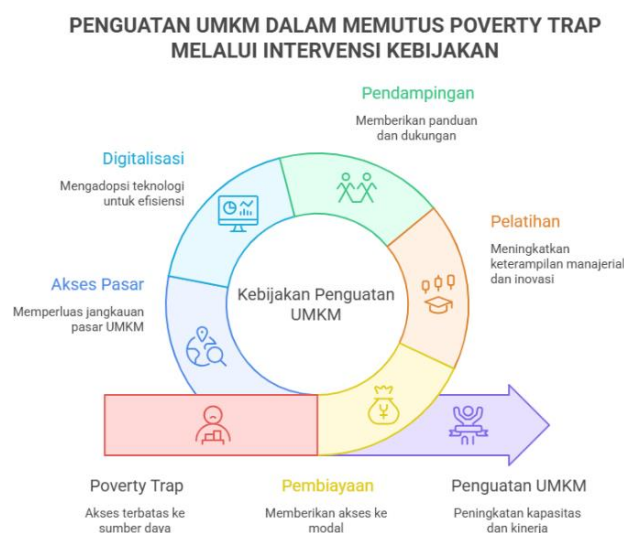
3. TINJAUAN PUSTAKA

3.1. Poverty Trap

Teori *Poverty Trap* menyatakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi yang sulit diatasi tanpa adanya intervensi eksternal atau perubahan struktural yang signifikan. Individu atau kelompok masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan biasanya tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi seperti pendidikan, modal, dan teknologi, yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Tanpa akses ini, mereka cenderung terjebak dalam lingkaran kemiskinan, di mana rendahnya pendapatan menyebabkan minimnya kesempatan untuk berkembang dan sebaliknya. *Poverty Trap Theory* menekankan bahwa untuk mematahkan lingkaran kemiskinan, diperlukan intervensi yang mampu memberikan akses ekonomi yang lebih luas, seperti pemberdayaan UMKM, yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin.

3.2. UMKM

UMKM merupakan salah satu cara yang efektif dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. UMKM diakui menjadi penyumbang besar dalam pembangunan nasional, selain itu juga bisa menjadi pembuka lapangan pekerjaan yang cukup besar bagi tenaga kerja di Indonesia yang sangat memerlukan pekerjaan ditengah sulitnya mendapatkan pekerjaan di era globalisasi saat ini. UMKM perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah agar bisa lebih berkembang di Indonesia (Nasution & Burhanuddin, 2023).



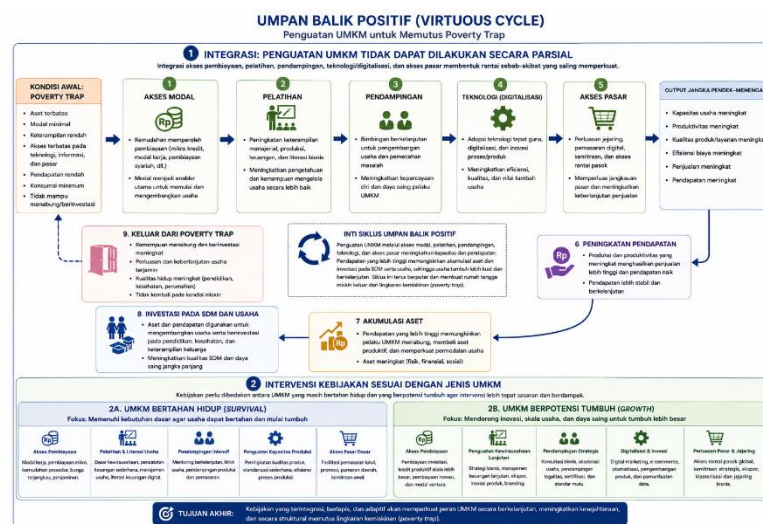
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Pemutusan *Poverty Trap* Melalui Penguatan UMKM di Indonesia

4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berdasarkan studio literatur sistematis tentang *Poverty Trap Theory* dan peranan UMKM dalam pengentasan kemiskinan. Analisis penelitian difokuskan pada bagaimana UMKM dapat mematahkan perangkap kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pengurangan ketimpangan ekonomi yang selanjutnya melihat karakteristik UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan metode studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan pada pengujian hipotesis statistik, melainkan pada pemahaman mendalam mengenai peran penguatan UMKM dalam pengentasan kemiskinan berdasarkan sintesis konseptual dan temuan dari berbagai sumber pustaka. Sumber data berasal dari artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang membahas UMKM, kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan *poverty trap* di Indonesia. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi sumber yang relevan, reduksi informasi utama, pengelompokan tema, interpretasi isi, dan penyusunan sintesis naratif.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Integrasi Penguatan UMKM dalam Memutus *Poverty Trap*



Gambar 2. Virtuous Cycle Pemutusan *Poverty Trap* Melalui Penguatan UMKM di Indonesia

Dalam perspektif *poverty trap*, penguatan UMKM dapat dipahami sebagai strategi untuk memutus lingkaran keterbatasan aset, pendapatan, dan peluang ekonomi. Ketika pelaku UMKM memperoleh akses modal, pelatihan, pendampingan, teknologi, dan pasar, kapasitas usaha meningkat, peningkatan kapasitas ini mendorong kenaikan produksi dan pendapatan, lalu membuka peluang akumulasi aset yang lebih baik (Aulia et al., 2024). Jika proses tersebut berlangsung secara konsisten, rumah tangga miskin tidak lagi sekadar mempertahankan konsumsi minimum, tetapi mulai memiliki ruang untuk menabung, memperluas usaha, dan berinvestasi pada pendidikan maupun kesehatan keluarga. Dengan demikian, penguatan UMKM bukan hanya strategi ekonomi mikro, tetapi juga bagian dari upaya struktural untuk mengurangi kemiskinan yang bersifat persisten (Annisa et al., 2025).

Peningkatan pendapatan memiliki implikasi yang lebih luas dibanding sekadar pemenuhan konsumsi harian. Literatur menjelaskan bahwa pendapatan yang lebih stabil

memungkinkan pelaku UMKM melakukan akumulasi aset, memperluas usaha, serta berinvestasi pada pendidikan dan kesehatan keluarga. Proses ini menciptakan siklus positif, di mana peningkatan kapasitas usaha akan menghasilkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan UMKM bukan hanya berdampak pada aspek ekonomi mikro, tetapi juga memiliki pengaruh sosial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

Akses modal menjadi faktor awal yang penting karena sebagian besar UMKM menghadapi keterbatasan pembiayaan untuk mengembangkan usaha. Ketersediaan modal memungkinkan pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, dan memperluas skala usaha. Namun demikian, modal saja tidak cukup apabila tidak diikuti oleh peningkatan kemampuan pengelolaan usaha. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kompetensi kewirausahaan, manajemen usaha, dan kemampuan pengambilan keputusan pelaku UMKM.

Perkembangan teknologi telah menjadikan digitalisasi sebagai salah satu faktor kunci dalam penguatan UMKM. Digitalisasi memungkinkan pelaku usaha memperoleh informasi pasar yang lebih luas, meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jaringan pelanggan, dan menurunkan biaya transaksi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM, terutama melalui pemasaran digital dan pemanfaatan platform daring (Putri, 2024).

Aspek pasar merupakan hal penting dalam penguatan UMKM. Produk yang berkualitas tidak akan memberikan dampak ekonomi yang optimal apabila tidak didukung oleh akses pasar yang memadai. Perluasan akses pasar memungkinkan UMKM meningkatkan volume penjualan, memperluas jaringan bisnis, serta menciptakan keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, akses pasar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi penguatan UMKM.

Hasil studi literatur lainnya menunjukkan bahwa penguatan UMKM merupakan salah satu strategi yang berpotensi memutus lingkaran kemiskinan (*poverty trap*). Dalam perspektif *poverty trap*, rumah tangga miskin sering mengalami keterbatasan modal, rendahnya keterampilan, minimnya akses terhadap teknologi, serta sempitnya peluang pasar. Kondisi tersebut menyebabkan produktivitas dan pendapatan tetap rendah sehingga sulit melakukan akumulasi aset dan meningkatkan kesejahteraan. Literatur menunjukkan bahwa penguatan UMKM tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan integrasi berbagai aspek yang saling mendukung, yaitu akses modal, pelatihan, pendampingan, digitalisasi, dan akses pasar. Integrasi tersebut membentuk suatu siklus penguatan usaha yang mampu meningkatkan kapasitas produksi, produktivitas, dan daya saing (Judijanto, 2024).

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Rachmawati, 2020) yang menyatakan bahwa UMKM memiliki probabilitas yang kuat sebagai strategi keluar (*exit strategy*) dari kemiskinan karena mampu menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperluas aktivitas ekonomi produktif. Dengan demikian, penguatan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengembangan usaha, tetapi juga sebagai mekanisme pembangunan ekonomi inklusif yang mampu mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan. Literatur menunjukkan bahwa penguatan UMKM tidak dapat dilakukan secara parsial. Kebijakan efektif membutuhkan integrasi antara akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, pengembangan kapasitas produksi, digitalisasi usaha, dan perluasan akses pasar (Azman et al., 2021).

Penguatan UMKM memiliki hubungan yang erat dengan upaya pengurangan kemiskinan struktural, khususnya dalam perspektif *poverty trap*. Kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap modal, keterampilan, teknologi, informasi pasar, dan kesempatan ekonomi. Dalam kondisi tersebut, rumah tangga miskin cenderung sulit meningkatkan kapasitas produktifnya

karena pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi minimum. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki ruang untuk menabung, berinvestasi, ataupun mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Literatur menunjukkan bahwa penguatan UMKM dapat menjadi instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan tersebut. Ketika pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, digitalisasi, serta perluasan akses pasar, maka kapasitas usaha akan meningkat. Peningkatan kapasitas tersebut tercermin dalam meningkatnya produktivitas, efisiensi usaha, kualitas produk, serta kemampuan bersaing di pasar. Kondisi ini kemudian berdampak pada peningkatan pendapatan pelaku usaha dan rumah tangga.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa penguatan UMKM tidak dapat dilakukan secara parsial. Kebijakan yang hanya berfokus pada bantuan modal tanpa disertai peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan akses pasar cenderung menghasilkan dampak yang terbatas. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan penguatan UMKM memerlukan pendekatan yang terintegrasi antara akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, pengembangan kapasitas produksi, digitalisasi usaha, serta perluasan jejaring pemasaran. Integrasi kebijakan tersebut penting agar UMKM mampu bertahan sekaligus berkembang dalam menghadapi perubahan pasar dan persaingan usaha.

Berdasarkan hasil sintesis literatur, integrasi antara akses modal, pelatihan, pendampingan, digitalisasi, dan akses pasar menghasilkan peningkatan kapasitas usaha yang ditunjukkan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, kualitas produk, dan daya saing. Peningkatan kapasitas tersebut selanjutnya mendorong peningkatan pendapatan dan akumulasi aset rumah tangga. Ketika pendapatan meningkat, pelaku usaha memiliki kemampuan untuk melakukan investasi kembali pada usaha, pendidikan, dan kesehatan keluarga sehingga peluang keluar dari kondisi kemiskinan menjadi semakin besar.

5.2. Intervensi Kebijakan Berdasarkan Karakteristik UMKM

Kajian literatur menunjukkan bahwa efektivitas penguatan UMKM sangat dipengaruhi oleh kesesuaian intervensi kebijakan dengan karakteristik dan tingkat perkembangan usaha. UMKM bukan kelompok yang homogen sehingga kebutuhan setiap pelaku usaha berbeda. Oleh karena itu, kebijakan yang bersifat seragam cenderung menghasilkan dampak yang kurang optimal. UMKM dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu UMKM yang masih berada pada tahap bertahan hidup (*survival*) dan UMKM yang telah memiliki potensi untuk berkembang (*growth*). Kedua kelompok tersebut memerlukan bentuk dukungan yang berbeda agar mampu berkembang secara berkelanjutan.

UMKM *survival* memiliki permasalahan utama yang dihadapi umumnya berkaitan dengan keterbatasan modal kerja, rendahnya literasi usaha, lemahnya kemampuan manajerial, dan minimnya akses terhadap informasi pasar. Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang lebih relevan adalah penyediaan akses pembiayaan yang mudah dijangkau, pelatihan dasar kewirausahaan, pendampingan usaha, serta peningkatan literasi keuangan dan digital. Dukungan tersebut bertujuan untuk memperkuat fondasi usaha sehingga pelaku UMKM mampu mempertahankan keberlangsungan usahanya (Yuanda et al., 2025).

UMKM yang telah berada pada tahap *growth* menghadapi tantangan yang berbeda. Fokus permasalahan tidak lagi sekadar bertahan hidup, melainkan meningkatkan daya saing dan memperluas pasar. Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang dibutuhkan meliputi inovasi produk, digitalisasi lanjutan, sertifikasi usaha dan produk, penguatan merek (*branding*), pengembangan jaringan bisnis, serta perluasan akses pasar nasional maupun internasional. Dukungan tersebut diperlukan agar UMKM mampu meningkatkan skala usaha dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar (Putri, 2024).

Literatur menegaskan bahwa intervensi kebijakan perlu disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat perkembangan UMKM. UMKM yang masih berada pada tahap *survival* atau bertahan hidup membutuhkan dukungan dasar seperti modal kerja, pendampingan intensif, dan literasi usaha. Sementara itu, UMKM yang telah memiliki potensi berkembang membutuhkan dukungan yang lebih berorientasi pada inovasi, digitalisasi, sertifikasi produk, serta penguatan jaringan pasar. Pendekatan kebijakan yang berlapis tersebut penting agar pengembangan UMKM tidak hanya meningkatkan jumlah usaha, tetapi juga memperkuat kualitas, daya tahan, dan keberlanjutan usaha.

Pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan terintegrasi tersebut berpotensi menciptakan transformasi ekonomi jangka panjang. Ketika UMKM berkembang secara produktif dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, maka ketergantungan terhadap kondisi ekonomi subsisten akan berkurang. Rumah tangga miskin tidak lagi hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi mulai memiliki kemampuan untuk menabung, memperluas usaha, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia keluarga. Oleh karena itu, penguatan UMKM dapat dipahami sebagai bagian dari strategi pembangunan inklusif yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengurangi kemiskinan secara struktural dan berkelanjutan.

Literatur juga menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan UMKM tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh sinergi antarpemangku kepentingan. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menyediakan regulasi, pembiayaan, dan infrastruktur pendukung. Di sisi lain, lembaga keuangan, perguruan tinggi, komunitas bisnis, dan sektor swasta berperan dalam memperkuat kapasitas usaha melalui pelatihan, pendampingan, inovasi, dan perluasan jaringan pasar (Judijanto, 2024).

Intervensi kebijakan perlu dibedakan antara UMKM yang masih berada pada tahap bertahan hidup dan UMKM yang sudah berpotensi tumbuh. Untuk kelompok pertama, dukungan dasar seperti modal kerja, pendampingan, dan literasi usaha lebih mendesak. Untuk kelompok kedua, kebutuhan utamanya adalah inovasi, digitalisasi, sertifikasi, dan penguatan jejaring pasar (Rachmawati, 2020). Pendekatan kebijakan yang berlapis ini penting agar UMKM tidak hanya bertambah secara kuantitas, tetapi juga meningkat kualitas dan daya tahannya. Kebijakan tersebut akan membuat peran UMKM dalam penanggulangan kemiskinan cenderung bersifat jangka panjang dan berpotensi untuk memutus kecenderungan *poverty trap* (Aulia et al., 2024). Ketika proses tersebut berlangsung secara konsisten, maka terbentuk umpan balik positif (*positive feedback loop*) berupa peningkatan kapasitas usaha, peningkatan pendapatan, akumulasi aset, dan investasi yang berkelanjutan. Pada akhirnya, kondisi tersebut memperbesar peluang rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan dan mengurangi risiko terjebak kembali dalam lingkaran kemiskinan (Rachmawati, 2020).

Disimpulkan bahwa pendekatan kebijakan yang terintegrasi dan berlapis lebih efektif dibandingkan pendekatan yang bersifat tunggal. Intervensi yang sesuai dengan karakteristik UMKM akan meningkatkan efektivitas penguatan usaha, mempercepat peningkatan produktivitas dan pendapatan, serta memperbesar peluang UMKM untuk berkembang secara berkelanjutan. Dalam perspektif *poverty trap*, diferensiasi kebijakan tersebut menjadi penting karena memungkinkan pelaku UMKM bergerak secara bertahap dari kondisi usaha yang rentan menuju usaha yang produktif, kompetitif dan berkelanjutan yang pada akhirnya memutus *poverty trap*.

6. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Integrasi penguatan UMKM melalui akses modal, pelatihan, pendampingan, digitalisasi, dan akses pasar merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kapasitas usaha

serta memutus lingkaran kemiskinan (*poverty trap*). Hasil studi literatur menunjukkan bahwa kombinasi berbagai bentuk dukungan tersebut mampu meningkatkan produktivitas, kualitas usaha, dan pendapatan pelaku UMKM yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan usaha, tetapi juga berperan dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan secara struktural.

2. Efektivitas penguatan UMKM sangat dipengaruhi oleh kesesuaian intervensi kebijakan dengan karakteristik dan tingkat perkembangan UMKM. UMKM yang masih berada pada tahap bertahan hidup memerlukan dukungan dasar berupa akses pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha. Sementara itu, UMKM yang telah memiliki potensi berkembang membutuhkan dukungan yang lebih berorientasi pada inovasi, digitalisasi, sertifikasi, dan perluasan jaringan pasar. Oleh karena itu, kebijakan yang terintegrasi, berlapis, dan adaptif sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok UMKM akan lebih efektif dalam memperkuat daya saing usaha, memperluas kesempatan ekonomi, dan mempercepat upaya pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Abidin, A., Syahbana, A. N., & Kutsiyah, F. (2025). Interlocking Poverty Trap di Kabupaten Sampang. *Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 7(2), 210–229. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v7i2.1157>
- Artha, D. P. (2023). Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia Keywords. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 10(1).
- Aulia, C., Fitriani, D., & Dwi Febriana Setyaningrum, W. (2024). PERAN UMKM DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PEMERATAAN PENDAPATAN DI INDONESIA. In *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu* (Vol. 8, Number 10).
- Azman, M., Andrianus, H. F., & Rustandi, I. D. (2021). MODEL PEMBERDAYAAN UMKM DENGAN PENDEKATAN KOLABORASI ABGC SEBAGAI STRATEGI KELUAR DARI MIDDLE INCOME TRAP. *Inspire Journal Economics and Development Analysis*, 1(1), 47–60.
- Judijanto, L. (2024). THE ROLE OF GOVERNMENT IN EMPOWERING UMKM: A LITERATURE REVIEW. *INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS (IJEFE)*, 1(4).
- Lubis, R., Putra, J. E., Widayati, T., Ladjin, N., Haidz, A., Fajar, A., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2024). Peran dan Strategi UMKM dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran di Indonesia. *Universitas Pendidikan Indonesia*, 5(8), 4082.
- Nasution, D. P., & Burhanuddin. (2023). ANALISIS EKSISTENSI UMKM DALAM MENGURANGI TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 07(01), 1–12.
- Putri, F. A. T. (2024). PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF MELALUI DIGITALISASI UMKM: ANALISIS KUALITATIF DI INDONESIA. *Gema Ekonomi (Jurnal*

Fakultas Ekonomi), 13(1), 13–20.
<https://journal.unigres.ac.id/index.php/GemaEkonomi/index>

Rachmawati, M. (2020). *KONTRIBUSI SEKTOR UMKM PADA UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA*.

Sukardi, K., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Bulan, J. (2021). *ANALISIS KEMISKINAN MULTIDIMENSI MASYARAKAT GORONG-GORONG KELURAHAN KEBUN SIRIH DI KABUPATEN MIMIKA*.

Yuanda, F., Sitompul, K., Syuhada, S., & Rauda, S. (2025). Peran Negara dalam Mendukung UMKM Melalui Akses Permodalan dan Digitalisasi (Studi Kasus pada Program KUR). *Journal of Economic Eduation*, 4(2), 136–147.
<https://doi.org/10.22437/jeec.v4i2.45163>